

**PENGARUH PARTISIPASI DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN,  
KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, STRUKTUR DESENTRALISASI,  
DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KINERJA  
MANAJERIAL PEMERINTAH DAERAH  
(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU)**

**Mila Suhardini, Kamaliah dan M.Rasuli**

Program Magister Manajemen Universitas Riau  
Kampus Pattimura Gedung K Jl. Pattimura No. 9 Gobah – Pekanbaru

**ABSTRAK**

*This study aims to test the Influence of Participation in Budgeting, Budget Goal Clarity, Structure Decentralization, and the Information Technology Systems Managerial Performance Local Government (Case Studies on Local Government of Riau Province). The sampling method using purposive sampling technique, the choice of non-probability samples that meet certain considerations.*

*The author conducted research based data retrieval techniques through questionnaires. Analysis of the data used has properties quantitative analysis of data through multiple linear regression equation with the t test and the partial test  $R^2$  and collected data is processed with the statistical program SPSS 17.0.*

*The results were obtained as a partial conclusion that four variables t (5,665, 9,482, 3,906 and 7,174) with four variables indicate t is greater than t table. It was concluded that the four variables (Participation in Budgeting, Budget Goal Clarity, Structure Decentralization, and Information Technology Systems) in this study a significant effect on Managerial Performance of Local Government. Moreover, judging from the determination of a test in which the values of R 0,934 and adjusted R<sup>2</sup> 0,867 or 86,7%. independent variables affect the dependent variable, is 13,3% influenced by other variables.*

**Kata Kunci : Budget, decentralization, technology and performance**

**PENDAHULUAN**

Hal yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik pada saat ini yaitu *good governance*. Tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah oleh masyarakat, agar terselenggara pemerintahan yang baik sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat serta adanya pengaruh globalisasi menuntut adanya keterbukaan. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah. Fenomena lain yang menyebabkan rendahnya kinerja pemerintah daerah yaitu masih banyaknya titipan kegiatan yang dilakukan baik oleh pejabat struktural maupun anggota DPRD.

Sehingga proses penganggaran pemerintah daerah selalu mengalami keterlambatan dalam pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena adanya tarik ulur dalam pembahasan anggaran. Keterlambatan ini menyebabkan banyak program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan untuk tahun anggaran berjalan dilaksanakan tepat waktu, APBD disahkan pada bulan Desember tahun sebelumnya, tapi dana seringkali lambat tersedia. Bukan hal yang aneh, walau tahun anggaran mulai per 1 Januari tapi sampai bulan Mei pun anggaran program di tingkat SKPD masih sulit didapatkan, sehingga kinerja pemerintah daerah tidak maksimal. Sehubungan dan berdasarkan permasalahan-permasalahan tentang kondisi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah sebagai penyelenggara pembangunan di daerah dalam upaya meningkatkan kinerja agar pembangunan efektif, efisien dan tepat sasaran dalam pelaksanaannya maka, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai hal tersebut di atas yaitu dengan judul “Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Struktur Desentralisasi, dan Sistem Teknologi Informasi terhadap Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Provinsi Riau)”.

Partisipasi dalam penyusunan anggaran dapat dijelaskan berdasarkan hasil penelitian Sinambela (2003) pada Herminingsih (2009) menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kinerja manajerial baik individu maupun kelompok penting untuk menerapkan anggaran partisipatif, agar para anggota organisasi memiliki motivasi yang tinggi untuk mencapai tujuan organisasi. Kejelasan sasaran anggaran menurut Kenis (1979) pada Bangun (2009) merupakan sejauh-mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung-jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Oleh karena itu sasaran anggaran pemerintah daerah harus dinyatakan dengan jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya.

Struktur desentralisasi menurut Siegel dan Marconi (1989) pada Bangun (2009) mengemukakan beberapa alasan suatu organisasi perlu membentuk struktur desentralisasi yaitu : 1.) Akan memberikan Top Manajemen waktu yang lebih banyak pada keputusan strategik jangka panjang dari keputusan operasi. 2.) Dapat membuat organisasi memberikan respon yang lebih cepat dan efektif pada saat menghadapi masalah. 3.) Sistem ini tidak memungkinkan untuk mendapatkan seluruh kebutuhan yang optimal. 4.) Akan menghasilkan dasar training yang baik untuk calon Top Manajemen dimasa yang akan datang. 5.) Memenuhi kebutuhan otonomi dan kemudian menjadi alat motivasi yang kuat bagi manajemen SKPD. Sistem teknologi informasi merupakan bagian yang sangat penting di era digital saat ini. Perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan kecepatan dan keakurasian dalam peningkatan kinerja akan sangat dipengaruhi oleh sistem teknologi informasi yang digunakan.

### **Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah**

Kinerja manajerial pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah daerah yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparat instansi tersebut (Sedarmayanti, 2004 dalam Nur Afrida, 2013).

### **Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran**

Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak, dimana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya. Partisipasi secara luas pada dasarnya merupakan proses organisasional, di mana para individual terlibat dan mempunyai pengaruh dalam pembuatan keputusan yang mempunyai pengaruh dalam pembuatan keputusan yang mempunyai pengaruh secara langsung terhadap para individu tersebut (Supomo dan Indriantoro, 1998). Anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang (perencanaan keuangan) untuk menunjukkan perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi.

### **Kejelasan Sasaran Anggaran**

Pada konteks pemerintah daerah, sasaran anggaran tercakup dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Selanjutnya, target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai organisasi, kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat, untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. Aparat akan memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan secara tepat. Selanjutnya, hal ini akan menurunkan perbedaan antara anggaran yang disusun dengan estimasi terbaik bagi organisasi.

### **Struktur Desentralisasi**

Perspektif desentralisasi politik didefinisikan sebagai devolusi kekuasaan (*devolution of power*) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Smith (1985) mendefinisikan desentralisasi sebagai ide *devolution of power* sebagai substansi utama dari desentralisasi, kendati devolusi kekuasaan yang dimaksud tidak hanya dibatasi pada struktural pemerintah (LIPI : 2006 : 68). Sedangkan perspektif desentralisasi administrasi lebih menekankan definisi desentralisasi sebagai delegasi wewenang administratif, *administrative authority*, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

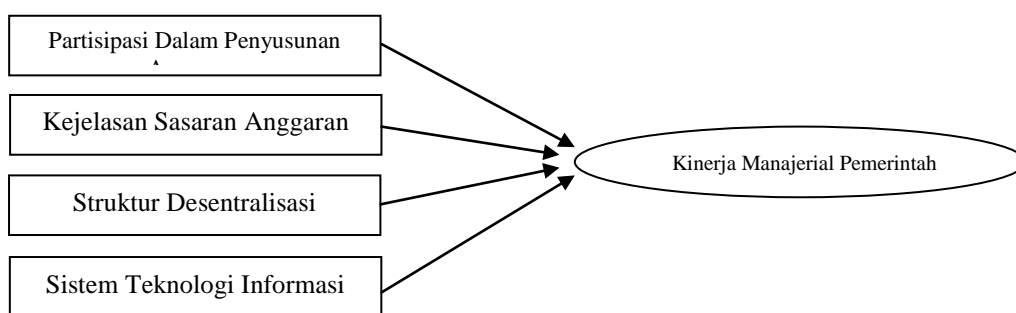
Rondinelli dan Cheema (1983 : 18), secara tegas mendefinisikan “*decentralization is the transfer of planing, decision making, or administrative authority from central government to its field organization, local administrative units, semi autonomous and parastatal organizations, local government, or non government organizations*” (LIPI : 2006 : 68).

**Sistem Teknologi Infomasi**

Teknologi Informasi (TI) dilihat dari kata penyusunnya adalah teknologi dan informasi. Kata teknologi bermakna pengembangan dan penerapan berbagai peralatan atau sistem untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, kata teknologi berdekatan artinya dengan istilah tata cara. Menurut Azmi, Yan (2009:2), “informasi adalah data yang diproses kedalam bentuk yang lebih berarti bagi penerima dan berguna dalam pengambilan keputusan, sekarang atau untuk masa yang akan datang”. Untuk lebih jelasnya berikut ini penulis kemukakan beberapa defenisi mengenai teknologi informasi. Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah penelitian, pada penelitian ini dapat dijabarkan bahwa terdapat 4 (empat) variabel indpenden yaitu partisipasi penyusunan anggaran (X1), kejelasan sasaran anggaran (X2), struktur desentralisasi (X3), sistem teknologi informasi (X4), diduga mempengaruhi kinerja manajerial pemerintah daerah (Y) baik secara simultan (*overall test*) maupun secara parsial (*individual test*).

Hubungan kerangka konsep pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada Gambar :

**Gambar 1.1. : Model Penelitian**



**Hipotesis**

Hipotesis Penelitian ini adalah :

- H1 ; partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah.
- H2 ; kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah.

- H3 ; struktur desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah.
- H4 ; sistem teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah.
- H5 ; partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, struktur desentralisasi, dan sistem teknologi informasi berpengaruh secara simultan terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah.

## METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah Tim Teknis Penyusunan APBD Provinsi Riau sebanyak 20 orang, dan 331 pejabat eselon IV yang terdapat pada 38 SKPD Pemerintah Provinsi Riau, jadi total populasi sebanyak 351 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 96 orang dengan rincian 20 orang Tim Teknis Penyusunan APBD Provinsi Riau dan 76 orang eselon IV yang terdapat pada 38 SKPD Pemerintah Provinsi Riau. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, *kurtosis* dan *skewness* (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2006:19). Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid nya suatu kuesioner.

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner tersebut mampu untuk mengungkapkan suatu yang akan diukur pada kuesioner tersebut (Ghozali, 2006, 49). Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2006, 46). Uji tersebut masing- masing untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrumen. Ada dua prosedur yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : uji reabilitas dengan melihat koefisien (cronbach) alpha. Nilai reliabilitas dilihat dari masing- masing instrumen ( $> 0,60$  dianggap reliabel) sebagaimana yang disyaratkan (*Nunnaly dalam Ghozali, 2006, 46*). Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda, maka diperlukan pengujian asumsi klasik yang meliputi pengujian normalitas, multikolonieritas, heteroskedastisitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Sreening data terhadap normalitas data merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk setiap analisis multivariate, khususnya jika tujuannya inferensi. Jika terdapat normalitas, maka residual akan terdistribusi secara normal dan independen. Menurut Ghozali (2006 : 30 & 152), normalitas suatu variabel dapat dideteksi dengan uji statistik (*Kolmogorav Smirnov*) dan grafik. Uji statistik dilakukan dengan melihat Nilai K-S dan probabilitas signifikan  $> 0.05$ , artinya distribusi data adalah normal. Dan sebaliknya bila probabilitas signifikan  $< 0.05$ , artinya distribusi data adalah tidak normal.

Menurut Ghozali (2006, 95), uji multikolonieritas bertujuan menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antara sesama variabel independen sama dengan nol.

Pada Ghozali (2006, 125), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika *variance residual* satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Kebanyakan data *crosssection* mengandung situasi heteroskedastisitas, karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar). Pengujian terhadap hipotesis dilakukan dengan bantuan komputer program *SPPS 17.00 for Windows* dengan menggunakan model analisis regresi berganda, yang bertujuan untuk memprediksi berapa besar kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam menguji variabel bebas partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, struktur desentralisasi, dan sistem teknologi informasi (X1, X2, X3, dan X4) dapat memprediksi variabel terikat dalam hal ini kinerja manajerial pemerintah daerah (Y). Maka digunakan *Analisa Regresi Linier Berganda*.

Menurut Supranto, (2000) dan Sudjana (1989), hubungan fungsional linier yang dibentuk antara variabel Y dan beberapa variabel X dinyatakan oleh *persamaan regresi linier berganda* adalah :

$$\text{Model} \quad : \quad Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Penjelasan :

Y	= Kinerja manajerial pemerintah daerah
X <sub>1</sub>	= Partisipasi dalam penyusunan anggaran
X <sub>2</sub>	= Kejelasan sasaran anggaran
X <sub>3</sub>	= Struktur desentralisasi
X <sub>4</sub>	= Sistem teknologi informasi
a	= Konstanta
b	= Koefisien Regresi
e	= Error

Pada Ghozali (2006,87), koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (terikat). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R<sup>2</sup> yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crosssection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*timeseries*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang tinggi. Jika dalam uji empiris didapat nilai adjusted  $R^2$  negatif, maka nilai adjusted  $R^2$  dianggap bernilai nol. Secara matematis jika nilai  $R^2 = 1$ , maka Adjusted  $R^2 = R^2 = 1$  sedangkan jika nilai  $R^2 = 0$ , maka adjusted  $R^2 = (1-k)/(n-k)$ . Jika  $k > 1$ , maka adjusted  $R^2$  akan bernilai negatif (Gujarati, 2007).

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh nyata antara variabel  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ , dan  $X_4$  terhadap  $Y$ . Tingkat signifikan yang digunakan adalah 0.05 yang lazim digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial. Pada Ghozali (2006,88), menyatakan bahwa uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas (*independen*) dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel tidak bebas (*dependen*). Pada uji Statistik F Test, hipotesis yang akan diuji adalah :

$H_0 : b_1 = b_2 = b_3 = b_4 = 0$  ( Artinya, tidak terdapat pengaruh signifikan simultan antara variabel bebas ( $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ , dan  $X_4$ ) terhadap variabel tidak bebas (kinerja manajerial pemerintah daerah).

$H_a : b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq b_4 \neq 0$  ( Artinya, terdapat pengaruh signifikan simultan antara variabel bebas ( $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ , dan  $X_4$ ) terhadap variabel tidak bebas (kinerja manajerial pemerintah daerah). Apabila  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dimana  $V_1 = k$  dan  $V_2 = N-k-1$  dan dengan derajat kekeliruan 5% ( $\alpha=0.05$ ), maka  $H_0$  ditolak, dan  $H_a$  diterima. Artinya terdapat nilai  $b$  yang tidak sama dengan 0, sehingga rumus tersebut dapat digunakan untuk melakukan peramalan kinerja manajerial pemerintah daerah. Apabila  $F_{hitung} < F_{tabel}$  dimana  $V_1 = k$  dan  $V_2 = N-k-1$  dan dengan derajat kekeliruan 5% ( $\alpha=0.05$ ), maka  $H_0$  diterima, dan  $H_a$  ditolak. Artinya tidak terdapat nilai  $b$  yang sama dengan 0, sehingga rumus tersebut tidak dapat digunakan untuk melakukan peramalan kinerja manajerial pemerintah daerah.

Pada Ghozali (2006,88), menyatakan bahwa uji T-test adalah untuk menguji keberartian koefisien model regresi secara individual (*partial*). Hipotesis pengujian pada penelitian ini adalah :

$H_0 : b_1 = 0$  Artinya terdapat pengaruh tidak signifikan antara variabel bebas partisipasi dalam penyusunan anggaran secara parsial terhadap variabel tidak bebas kinerja manajerial pemerintah daerah.

$H_a : b_1 \neq 0$  Artinya terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas partisipasi penyusunan anggaran secara parsial terhadap variabel tidak bebas kinerja manajerial pemerintah daerah.

$H_0 : b_2 = 0$  Artinya terdapat pengaruh tidak signifikan antara variabel bebas kejelasan sasaran anggaran secara parsial terhadap variabel tidak bebas kinerja manajerial pemerintah daerah.

$H_a : b_2 \neq 0$  Artinya terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas kejelasan sasaran anggaran secara parsial terhadap variabel tidak bebas kinerja manajerial pemerintah daerah.

$H_0 : b_3 = 0$  Artinya terdapat pengaruh tidak signifikan antara variabel bebas struktur desentralisasi secara parsial terhadap variabel tidak bebas kinerja manajerial pemerintah daerah.

$H_a : b_3 \neq 0$  Artinya terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas struktur desentralisasi secara parsial terhadap variabel tidak bebas kinerja manajerial pemerintah daerah.

$H_0 : b_4 = 0$  Artinya terdapat pengaruh tidak signifikan antara variabel bebas sistem teknologi informasi secara parsial terhadap variabel tidak bebas kinerja manajerial pemerintah daerah.

$H_a : b_4 \neq 0$  Artinya terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas sistem teknologi informasi secara parsial terhadap variabel tidak bebas kinerja manajerial pemerintah daerah. Untuk menentukan keberadaan pengaruh dari seluruh variabel bebas secara individual (parsial) terhadap variabel terikat dilakukan dengan membandingkan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  yaitu apabila  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $t_{hitung} > t_{tabel}$ ) berarti variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat dan sebaliknya, apabila  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$  ( $t_{hitung} < t_{tabel}$ ) berarti variabel bebas tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Dalam hal ini tingkat kepercayaan  $\alpha$  sebesar 5%.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengujian dapat dilihat bahwa  $r_{hitung}$  lebih besar dari  $r_{tabel}$  untuk sampel sebanyak 83 adalah 0,213, sebagaimana dapat digambarkan pada tabel 4.3.



Tabel 4.3 Uji Validitas Variabel

Variabel	Butir Instrumen	r hitung	r tabel	Keterangan
Kinerja manajerial pemda (Y)	a. KMP1	0.564	0,213	Valid
	b.KMP2	0.461	0,213	Valid
	c.KMP3	0.651	0,213	Valid
	d.KMP4	0.582	0,213	Valid
	e.KMP5	0.718	0,213	Valid
	f. KMP6	0.667	0,213	Valid
Partisipasi dalam penyusunan anggaran (X1)	a. PPA1	0.684	0,213	Valid
	b. PPA2	0.796	0,213	Valid
	c. PPA3	0.893	0,213	Valid
	d. PPA4	0.447	0,213	Valid
Kejelasan sasaran anggaran (X2)	a. KSA1	0.829	0,213	Valid
	b. KSA2	0.689	0,213	Valid
	c. KSA3	0.744	0,213	Valid
	d. KSA4	0.771	0,213	Valid
	e. KSA5	0.671	0,213	Valid
	f. KSA6	0.623	0,213	Valid
Struktur desentralisasi (X3)	a.SD1	0.744	0,213	Valid
	b. SD2	0.803	0,213	Valid
	c. SD3	0.820	0,213	Valid
	d. SD4	0.644	0,213	Valid
	e. SD5	0.813	0,213	Valid
	f. SD6	0.724	0,213	Valid
Sistem teknologi informasi (X4)	a. STI1	0.589	0,213	Valid
	b. STI2	0.665	0,213	Valid
	c. STI3	0.754	0,213	Valid
	d. STI4	0.876	0,213	Valid
	e. STI5	0.818	0,213	Valid
	f. STI6	0.770	0,213	Valid

Sumber : data primer diolah, 2014

Setelah dilakukan uji validitas, langkah selanjutnya adalah melakukan uji reliabilitas data yaitu dengan melihat nilai *Cronbach Alpha*. Uji reliabilitas dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya. Secara umum suatu instrumen dikatakan bagus jika memiliki koefisien *Cronbach Alpha* > 0,6 maka kuesioner penelitian tersebut dinyatakan reliabel. Hasil pengujian data menunjukkan bahwa nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa data penelitian dinyatakan reliabel.

Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Nilai Cronbach Alpha	Keterangan
1	Kinerja manajerial pemerintah daerah	0,838	Reliabel
2	Partisipasi dalam penyusunan anggaran	0,865	Reliabel
3	Kejelasan sasaran anggaran	0,898	Reliabel
4	Struktur desentralisasi	0.914	Reliabel
5	Sistem teknologi informasi	0,906	Reliabel

Sumber : data primer diolah, 2014

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, maka diperoleh diskripsi data penelitian sebagai berikut :

**Tabel 4.5 Tanggapan Responden**

Variabel Penelitian	Rentang Teoritis	Rentang Aktual	Rata-rata Teoritis	Rata-rata Aktual	Standar Deviasi
Kinerja Manajerial Pemda	6 – 30	11 – 30	18	23,70	3,959
Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran	4 – 20	4 – 20	12	15,90	3,279
Kejelasan Sasaran Anggaran	6 – 30	16 – 30	18	24,46	2,902
Struktur Desentralisasi	6 – 30	6 – 27	18	16,63	5,138
Sistem Teknologi Informasi	6 – 30	10 - 30	18	23,22	4,058

*Sumber : data primer diolah, 2014*

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat disajikan hasil statistik deskriptik tentang variabel-variabel penelitian sebagai berikut :

1. Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah  
Rata-rata aktual jawaban responden diatas rata-rata teoritis ini mengindikasikan bahwa responden mempunyai persepsi kinerja manjerial pemerintah daerah relatif tinggi.
2. Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran  
Nilai rata-rata jawaban variabel partisipasi dalam penyusunan anggaran diatas rata-rata rentang teoritis, hal ini mengindikasikan bahwa responden mempersepsikan partisipasi dalam penyusunan anggaran relatif tinggi.
3. Kejelasan Sasaran Anggaran  
Rata-rata aktual jawaban responden diatas rata-rata teoritis ini mengindikasikan bahwa responden mempunyai persepsi kejelasan sasaran anggaran daerah relatif tinggi.
4. Struktur Desentralisasi  
Rata-rata aktual jawaban responden di bawah rata-rata teoritis ini mengindikasikan bahwa responden mempunyai persepsi struktur desentralisasi relatif rendah.
5. Sistem Teknologi Informasi  
Rata-rata aktual jawaban responden diatas rata-rata teoritis ini mengindikasikan bahwa responden mempunyai persepsi sistem teknologi informasi relatif tinggi.

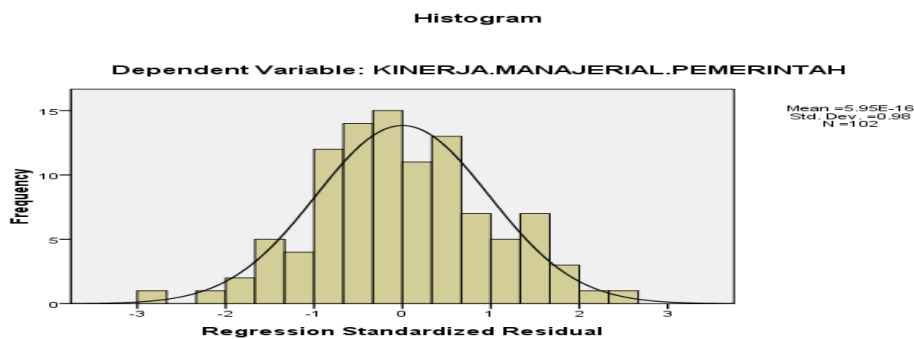
**Analisis Uji Kuantitatif**

**Uji Asumsi Klasik**

**a. Pengujian Normalitas**

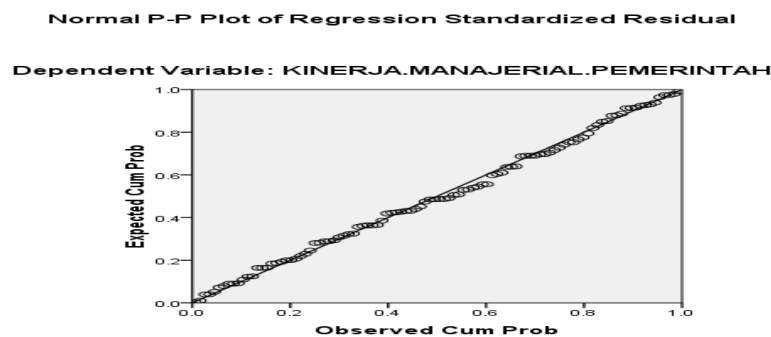
Nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 1,027 dengan tingkat signifikan sebesar 0,243. Jika signifikansi nilai Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0.05, maka data mempunyai distribusi normal. Hal ini juga didukung dengan grafik histogram pada gambar 4.1 dan grafik normal P-plot pada gambar 4.2, dimana dasar pengambilan keputusan menurut Ghozali (2006) yaitu : Jika sumbu menyebar sekitar garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas dan jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

**Gambar 4.1 Grafik Histogram**



*Sumber : data primer diolah, 2014*

**Gambar 4.2 Grafik Normal**



*Sumber : data primer diolah, 2014*

Kedua grafik tersebut menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

**b. Pengujian Multikolonieritas**

Hasil uji multikolonieritas dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini.

**Tabel 4.7 Uji Multikolonieritas**  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	2.550	2.081		1.226	.223		
PARTISIPASI.DLM.PENY.ANGGARAN	.414	.073	.535	5.665	.000	.148	6.754
KEJELASAN.SASARAN.ANGGARAN	.364	.040	.642	9.482	.000	.422	2.368
STRUKTUR.DSENTRALISASI	.235	.060	.244	3.906	.000	.337	2.964
SISTEM.INFORMASI	.590	.082	.670	7.174	.000	.152	6.600

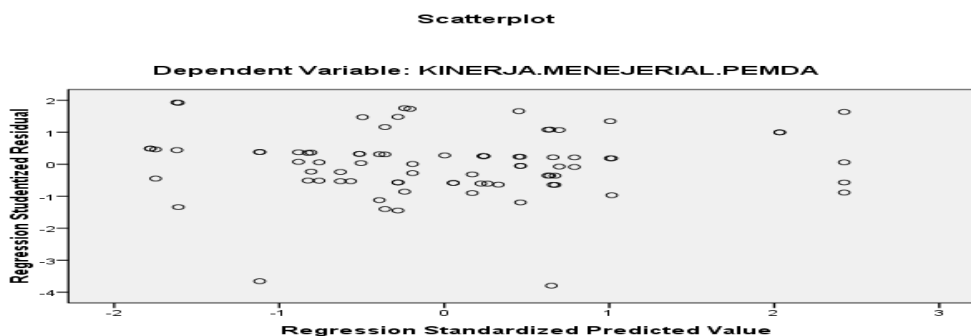
Sumber : data primer diolah, 2014

Berdasarkan hasil uji korelasi diantara variabel independen, dapat dilihat bahwa angka *tolerance* dari variabel independen partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, struktur desentralisasi dan sistem teknologi informasi mempunyai *tolerance* lebih dari 0,10 yang berarti bahwa tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya 95%. Sementara itu, hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama. Tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan dalam model regresi tidak terjadi multikolonieritas antar variabel independen tersebut.

**c. Pengujian Heteroskedastisitas**

Hasil pengujian heterokedastisitas dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut ini.

**Gambar 4.3 Grafik Scatterplot**



Sumber : Data primer diolah, 2014

### Analisis Regresi Berganda

Model regresi berganda dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh variabel independen partisipasi dalam penyusunan anggaran (X1), kejelasan sasaran anggaran (X2), struktur desentralisasi (X3) dan sistem teknologi informasi (X4) terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah (Y).

#### a. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, maka diperoleh hasil uji koefisien determinasi sebagai berikut :

**Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi**  
Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	Df2	Sig. F Change	
1	.934 <sup>a</sup>	.872	.867	1.76477	.872	165.019	4	97	.000	2.019

*Sumber : Data primer diolah, 2014*

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai R sebesar 0,934, hal ini menunjukkan bahwa variabel partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, struktur desentralisasi dan sistem teknologi informasi mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan kinerja manajerial pemerintah daerah. Jika independen variabel lebih dari satu, maka sebaiknya untuk melihat kemampuan variabel memprediksi variabel dependen, nilai yang digunakan adalah nilai *adjusted R<sup>2</sup>*. Nilai *adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,867 mempunyai arti bahwa variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel independen sebesar 86,7%. Dengan kata lain 86,7% perubahan dalam kinerja manajerial pemerintah daerah mampu dijelaskan variabel partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, struktur desentralisasi dan sistem teknologi informasi, sisanya sebesar 13,3% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diikuti dalam penelitian ini.

#### b. Uji Simultan (Uji F)

Dari uji ANOVA atau *Ftest* seperti yang ditampilkan pada tabel 4.9, didapat  $F_{hitung}$  dengan tingkat signifikan 0,000. Karena probabilitas 0,000 lebih kecil dari 0,5, maka hasil dari model regresi menunjukkan bahwa ada pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, struktur desentralisasi dan sistem teknologi informasi terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah.

**Tabel 4.9. Hasil Uji Simultan (Uji F)  
ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2055.746	4	513.937	165.019	.000 <sup>a</sup>
	Residual	302.097	97	3.114		
	Total	2357.843	101			

Sumber : Data primer diolah, 2014

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan maka model penelitian adalah sebagai berikut :

$$\text{Kinerja} = 2,550 + 0,414 \text{ PPA} + 0,364 \text{ KSA} + 0,235 \text{ SD} + 0,590 \text{ STI} + e$$

Nilai  $F_{hitung}$  dibandingkan dengan  $F_{tabel}$  dimana jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  secara simultan variabel-variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pada  $\alpha = 0,05$  dengan derajat kebebasan pembilang /df1 ( $k$ ) = 4 (jumlah variabel independen) dan derajat kebebasan penyebut/df2 ( $n-k-1$ ) = 97, diperoleh nilai  $F_{tabel}$  2,470. Dengan demikian, nilai  $F_{hitung}$  165,019 lebih besar dari nilai  $F_{tabel}$  (2,470). Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa variabel partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, struktur desentralisasi dan sistem teknologi informasi secara bersama – sama mempengaruhi variabel kinerja manjerial pemerintah daerah.

**c. Uji Parsial (Uji t)**

**Tabel 4.10. Hasil Uji Parsial (Uji t)  
Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized		Standardized	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1(Constant)	2.550	2.081		1.226	.223
PARTISIPASI.DLM.PENY.ANGGARAN	.414	.073	.535	5.665	.000
KEJELASAN.SASARAN.ANGGARAN	.364	.040	.642	9.482	.000
STRUKTUR.DSENTRALISASI	.235	.060	.244	3.906	.000
SISTEM.INFORMASI	.590	.082	.670	7.174	.000

Sumber : Data Primer diolah, 2014

Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) yang menyebutkan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel partisipasi dalam penyusunan anggaran (X1) adalah 0,414 dan nilai  $t_{hitung}$  5,665.

Nilai koefisien regresi ini signifikan pada tingkat signifikan 0,05 dengan *p value* sebesar 0,000. Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) yang menyebutkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel kejelasan sasaran anggaran (X2) adalah 0,364 dan nilai  $t_{hitung}$  9,482. Nilai koefisien regresi ini signifikan pada tingkat signifikan 0,05 dengan *p value* sebesar 0,000. Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) yang menyebutkan bahwa struktur desentralisasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel partisipasi dalam struktur desentralisasi (X3) adalah 0,235 dan nilai  $t_{hitung}$  3,906. Nilai koefisien regresi ini signifikan pada tingkat signifikan 0,05 dengan *p value* sebesar 0,000. Hasil pengujian hipotesis keempat (H4) yang menyebutkan bahwa sistem teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel partisipasi dalam sistem teknologi informasi (X4) adalah 0,590 dan nilai  $t_{hitung}$  7,174. Nilai koefisien regresi ini signifikan pada tingkat signifikan 0,05 dengan *p value* sebesar 0,000.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut : partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh cukup signifikan terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah, kejelasan sasaran anggaran berpengaruh cukup signifikan terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah, struktur desentralisasi berpengaruh cukup signifikan terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah, sistem teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah, dan secara simultan, partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, struktur desentralisasi dan sistem teknologi informasi mempunyai pengaruh terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah, dan hal ini sejalan dengan hipotesis penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan, dimana penelitian ini menggunakan metode survey tanpa dilengkapi dengan wawancara yang mengakibatkan jawaban responden belum tentu mencerminkan keadaan sebenarnya, sehingga kemungkinan mempengaruhi validitas hasil. Disarankan untuk penelitian berikutnya diharapkan menggunakan metode lain, misalnya menggunakan metode wawancara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aprilyati, A., 2003. Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan, Desentralisasi dan Teknologi Informasi melalui Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Broad Scope dan Aggregation pada Rumah Sakit Umum Dr. Soedhono Madiun, *Tesis*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran. Surabaya.

- Bangun, A., 2009. Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang), *Tesis*. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Bastian, I., 2006. *Audit Sektor Publik : Suatu Pengantar*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007. *Audit Sektor Publik*, Edisi 2, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Coryanata, I., 2011. Penggunaan Teknologi Informasi dan Sistem Akuntansi Manajemen sebagai Pemoderasi dalam Hubungan antara Intensitas Persaingan Pasar terhadap Kinerja Perusahaan, *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, Vol. 4 No.2. Juli.
- Din, M., 2008. Antecedent dan Konsekuensi Partisipasi Penganggaran (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Pemda Kota Palu), *Tesis*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Emami, M., et.al., 2012. Government Accounting An Assessment of Theory, Purpose and Standards, *Journal of Contemporary Business Research*, Vol. 3 No. 9. June.
- Faguet, JP., 2000. Decentralization and Local Government Performance Improving Public Services Provision in Bolivia, *Colombian Academic Journal*. 3(1) : 127-176.
- Fitri, Meutia dan Z. Basri., 2000. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Motivasi Pencapaian Anggaran Perusahaan Industri Petrokimia Aceh Utara, *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol.2 No. 3 : 229-239.
- Ghozali, I., 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Edisi 4, BP. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ghozali, I, dan Ratmono, D., 2008. *Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat (APBN) dan Daerah (APBD)*, Edisi 3, BP. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gujarati, D., 2007. *Dasar-dasar Ekonometrika*, Edisi 3, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Hendriksen, M.C., and Breda, M.F., 2005. *Accounting Theory*, 7<sup>th</sup> Ed. Boston, Richard D. Irwin
- Herminingsih, 2009. Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran Dan Peran Manajerial Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Study Empiris pada PemKab Demak), *Tesis*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Indudewi, D., 2009. Pengaruh Sasaran Jelas dan Terukur, Insentif, Desentralisasi dan Pengukuran Kinerja terhadap Kinerja Organisasi, *Tesis*. Universitas Diponegoro Semarang.



- Indarto, S.L., dan Ayu, S.D., 2011. Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Perusahaan melalui Kecukupan Anggaran, Komitmen Organisasi, Komitmen Tujuan Anggaran, dan Job Relevant Information, *Kajian Ilmiah*, Vol. 14 No. 1, Januari.
- Jaryanto, 2008. Pengaruh Ketidakpastian Tugas dan Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial dengan Sistem Akuntansi Manajemen sebagai Variabel Intervening, *Tesis*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Jogiyanto, 2008. *Sistem Teknologi Informasi*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mahmudi, 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*, Artikel I Tahun I No. 4. Juni.
- Miftah, T., 2003. *Birokrasi dan Politik Di Indonesia*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nurlan, D., 2008. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*, Cetakan ke-2, Penerbit PT. Indeks, Jakarta.
- Ramandei, P., 2009. Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung), *Tesis*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Riyadi, S., 2007. Pengaruh Desentralisasi, Motivasi dan Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Manajerial pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta, *Majalah Ekonomi*, Tahun XVII No. 2. Agustus.
- Sancoko, S., Tjik, D., dan Madjid, N., 2009. *Kajian Terhadap Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja di Indonesia*, DepKeu, Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan. Jakarta.
- Sinambela, E., 2003. Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial, *Tesis*. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Smith, K., and Cheng, R., 2004. Assessing Reforms of Government Accounting and Budgeting, *Research in Governmental and Nonprofit Accounting*, Vol. 8, 39-68. Greenwich, CT. JAI Press.
- Sudaryanti, D., 2013. Pengaruh Penganggaran terhadap Kinerja Aparat Pemda melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (Studi Kasus Pemda Kabupaten Kudus), *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 12 No 01. Maret.
- TIM LIPI, 2006. *Membangun Format Baru Otonomi Daerah*, Penerbit LIPI Press, Jakarta.
- Verbeeten, F., 2008. Performance Management Practices in Public Sektor Organization, *Impact on Performace, Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Vol. 21 No. 3, PP. 427-454.
- Yuwono, S., Indrajaya, A., Hariadi, 2005. *Penganggaran Sektor Publik-Pedoman Praktis Penyusunan Anggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggung Jawaban APBD (Berbasis Kinerja)*, Penerbit Pemerintahan Kota Dumai dan e-Conos Consulting, Kota Administrasi Kota Dumai, Propinsi Riau.